

**PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
DI MI MA'ARIF NU PLIKEN KECAMATAN KEMBARAN
KABUPATEN BANYUMAS**



TESIS

**Disusun dan Diajukan Kepada Program Pasca Sarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Manajemen Pendidikan (M.Pd.)**

**NGISA
NIM: 1423402077**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2017**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAC	vii
TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR BAGAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10

	E. Manfaat Penelitian	10
	1. Manfaat Teoritik	10
	2. Manfaat Praktis	11
	F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II	PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN	
	A. Konsep Partisipasi Masyarakat	13
	1. Pengertian Partisipasi Masyarakat	15
	2. Macam-Macam Partisipasi Masyarakat	23
	3. Fungsi dan Tujuan Partisipasi Masyarakat	23
	4. Bentuk Partisipasi Masyarakat	26
	5. Manfaat Partisipasi	29
	6. Prasyarat Partisipasi	30
	7. Partisipasi Masyarakat dalam pendidikan	32
	B. Konsep Meningkatkan Mutu Pendidikan	38
	C. Hasil Penelitian Yang Relevan	53
	D. Kerangka Berfikir	55
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Tempat dan Waktu Penelitian	58
	B. Jenis dan Pendekatan	59
	C. Data Dan Sumber Data	61
	D. Teknik Pengumpulan Data	64
	E. Tehnik Analisis Data	65

	F. Keabsahan Data	66
BAB IV	PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MI MA'ARIF NU PLIKEN	
	A. Profil MI Ma'arif NU Pliken	69
	B. Penyajian Data	79
	1. Gambaran Partisipasi Masyarakat di MI Ma'arif NU Pliken	85
	2. Usaha Sekolah Dalam Partisipasi Masyarakat	88
	C. Peningkatan Mutu Pendidikan di MI Ma'arif NU Pliken	95
	D. Analisa Data Hasil Penelitian	99
	1. Tingkatan Partisipasi Masyarakat Bentuk (<i>Form</i>)	99
	2. Tingkatan Partisipasi Masyarakat Menurut Sekolah (<i>Top-Down</i>)	101
	3. Tingkatan Partisipasi Menurut Masyarakat (<i>Battom-Up</i>)	103
	4. Tingkatan Partisipasi Masyarakat menurut Fungsi	104
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
	A. Kesimpulan	106
	B. Rekomendasi	108
	C. Kata Penutup	109
	DAFTAR PUSTAKA	111
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	114
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Bentuk Partisipasi Masyarakat	16
Tabel 2. Daftar Madrasah di Kecamatan Kembaran.....	68
Tabel 3. Data Jadwal Ekstra Kurikuler MI Ma'arif NU Pliken.....	77

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1.1 Kerangka Berpikir	54

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. SK Penetapan Dosen Pembimbing Tesis	109
Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian	109
Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	109
Lampiran 4. Pedoman Observasi	109
Lampiran 5. Pedoman Wawancara	110
Lampiran 6. Transkrip Wawancara Muhimah,S.Pd.I dkk.....	115
Lampiran 7. Transkrip Wawancara dengan kepala MI, Muhimah,S.Pd.I ...	116
Lampiran 8. Transkrip Wawancara Ketua Komite, Chamdan BA.....	118
Lampiran 9. Transkrip Wawancara dengan orangtua siswa, Imam Ibnu Ngasir.....	121
Lampiran 10. Transkrip Wawancara dengan Guru MI,Ibnu Mustolih,S.Pd.I.....	122
Lampiran 11. Dokumen Pendukung	
1. Struktur Organisasi Komite Sekolah Mi Ma'arif NU Pliken	
2. Struktur Organisasi Pengurus MI Ma'arif NU Pliken.	
3. Daftar Tabel keadaan siswa MI Ma'arif Nu Pliken	
4. Daftar Tabel keadaan Guru dan Karyawan MI Ma'arif NU Pliken	
5. Daftar Tabel Daftar Nilai UN/US MI Ma'arif NU Pliken	
6. Daftar Tabel Prestasi Siswa Yang diraih oleh Siswa/siwi MI Ma'arif NU Pliken	
7. Dokumen Foto-foto.	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dapat dikatakan pada saat ini tanggung jawab masing - masing belum optimal, terutama partisipasi masyarakat yang masih dirasakan belum banyak diberdayakan. Oleh karena itu, secara hakiki pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan, pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, didalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, masyarakat dan warga negara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga.

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan salah satu misinya adalah memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Pembinaan pendidikan dasar dan menengah adalah mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah atau masyarakat dengan memperkenalkan Dewan Pendidikan ditingkat Kabupaten/Kota serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah ditingkat sekolah. Hasil analisis dari berbagai studi menunjukkan bahwa ada dua factor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Pertama, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada keluaran pendidikan (*output*) terlalu memusat (*input*) dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik yang menyebabkan tingginya ketergantungan kepada birokrasi dan seringkali kebijakan pusat terlalu umum dan kurang

menyentuh atau tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah setempat. Segala sesuatu yang diatur menyebabkan penyelenggara sekolah kehilangan kemandirian, inisiatif, dan kreatif. Hal ini menyebabkan usaha dan daya untuk mengembangkan atau meningkatkan mutu pendidikan dan keluaran terutama orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini hanya terbatas pada dukungan dana, padahal partisipasi mereka sangat penting dalam proses pendidikan antara lain pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi dan akuntabilitas.

Sejalan dengan perubahan paradigma baru pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi dalam urusan pemerintahan, termasuk urusan pendidikan. Pendidikan tidak hanya menjadi urusan pemerintah saja, namun juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi orangtua dan masyarakat dengan pemerintah diharapkan menjadi kerjasama yang sinergis untuk meningkatkan mutu pendidikan. Konsep desentralisasi dalam pendidikan muncul sejalan dengan perkembangan pola pikir masyarakat sebagai salah satu dampak pembangunan pendidikan. Pemikiran pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah melahirkan konsep gagasan untuk mengembangkan sistem desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan nasional.

Simon dalam Komariah dan Triatna mendefinisikan desentralisasi sebagai suatu organisasi administratif adalah sentralisasi yang luas apabila keputusan yang dibuat pada level organisasi yang tinggi, desentralisasi yang luas apabila keputusan didelegasikan dari top management kepada level yang rendah dari wewenang eksekutif.¹ Berdasarkan pengertian tersebut, desentralisasi merupakan wujud kepercayaan pusat kepada daerah untuk melaksanakan pembangunannya berdasarkan prakarsa sendiri. Implikasinya adalah daerah harus bertanggung jawab secara profesional untuk menampilkan kinerja terbaiknya.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus diartikan sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan

¹ Komariah dan Triatna, *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008). hlm. 70

masyarakat dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi, aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut adalah Dewan Pendidikan ditingkat kabupaten/kota dan Komite sekolah di tingkat satuan pendidikan.

Upaya pemerintah untuk peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan nasional perlu dukungan dari semua stakeholder, mengingat masalah pendidikan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukti kongkrit keseriusan dan kesungguhan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah diterbitkannya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang sesuai dengan amanat perubahan Undang-undang Dasar 1945. Komite Sekolah merupakan penyempurnaan dan perluasan badan kemitraan dan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat Komite Sekolah dibentuk sebagai bagian dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan mempunyai kewenangan untuk mengelola dirinya sendiri. Pengelolaan sekolah ini dijalankan dengan asas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas artinya dalam pengelolaan sekolah dewan pendidikan khususnya kepala sekolah bekerja sama dengan masyarakat sekolah. Oleh sebab itu, diperlukan wadah yang bisa dipakai oleh masyarakat sekolah untuk mengemban amanat tersebut. Wadah tersebut adalah Komite Sekolah. Sebagaimana di jelaskan oleh Mulyasa bahwa dalam MBS memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dan melibatkan masyarakat dalam rangka mengeluarkan kebijakan pendidikan.²

Sebagaimana diungkapkan pula oleh Rohmat bahwa manajemen berbasis sekolah adalah desentralisasi pendidikan yang lebih memberikan keluasaan untuk mengambil kebijakan pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan sistem kinerja dalam pendidikan.³ Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun

² Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung : PT Rosdakarya, 2007), hlm. 24

³ Rohmat, *Kepemimpinan pendidikan*, (STAIN Pres Purwokerto, 2010) hlm. 3

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dengan kata lain, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua dan masyarakat atau stakeholder pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (*comunicaty-based*) dan manajemen berbasis sekolah (*school-based management*), yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi telah mulai dilaksanakan disekolah.

Undang-udnang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 54 disebutkan bahwa :

1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.⁴

Secara lebih spesifik dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 56 menyebutkan bahwa di masyarakat ada Komite Sekolah yang berperan sebagai berikut :

1. Masyarakat berperan dalam peningkatan perannya yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.
2. Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan prtimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta

⁴ Undang-Undang No.20 tahun 2003.tentang Sistem Pendidikan Nasional.(Bandung: Citra Umbara,2006),hal.104

pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

3. Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.⁵

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan, sekolah perlu adanya partisipasi masyarakat dengan mengajak bekerjasama (*togetherness*) stakeholder dan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga semua potensi itu dikembangkan secara maksimal sesuai dengan kapabilitas masing – masing. Kebersamaan merupakan potensi yang sangat vital untuk membangun masyarakat untuk menciptakan demokrasi pendidikan.

Disamping itu sekolah bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan sehingga memberikan keputusan dan memiliki kebenaran untuk dikoreksi oleh stakeholder. Dengan kata lain, sekolah bersedia memberikan kepuasan publik dan menerima kritik untuk perbaikan terhadap penyelenggaraan pendidikan sekolah. Namun dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya dalam proses belajar mengajar masyarakat/komite sekolah kebanyakan belum berperan aktif dalam peningkatan mutu. Komite sekolah hanya diperlukan pada saat adanya bantuan-bantuan pendidikan yang diberikan, komite sekolah lebih berperan sebagai input (data) dibandingkan berperan dalam proses sehingga seringkali komite sekolah sebagai formalitas satuan pendidikan.

Pada kenyataanya komite yang merupakan wadah organisasi perwakilan dari masyarakat, sebagai lembaga otonom menunjukan indikasi kurang berfungsi sesuai dengan perannya yang telah ditentukan dan hanya berfungsi saat adanya bantuan dari pemerintah dan input (dana), juga adanya indikasi komite sekolah kurang berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Padahal partisipasi masyarakat dalam pendidikan ini merupakan sesuatu yang esensial bagi penyelenggaraan sekolah yang baik, karena tingkat

⁵ Undang-Undang No. 20 tahun 2003. *tentang Sistem Pendidikan Nasional.* (Bandung : Citra Umbara, 2006), hlm..105

partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan di sekolah ini akan memberikan pengaruh yang besar bagi kemajuan sekolah. Kuwalitas pelayanan pembelajaran di sekolah yang baik pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kemajuan dan prestasi belajar anak-anak di sekolah.

Hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai suatu proses kegiatan menumbuhkan dan membina saling pengertian kepada masyarakat dan orang tua murid tentang visi dan misi sekolah, program kerja sekolah, masalah-masalah yang dihadapi serta berbagai aktivitas sekolah lainnya. Suatu lembaga pendidikan didirikan karena didorong oleh kebutuhan masyarakat, sehingga tanggung jawab pendidikan di sekolah merupakan tanggung jawab masyarakat, keluarga dan pemerintah. Jika orang tua murid dan masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi kepada program sekolah, maka penyampaian informasi tentang sekolah yang meliputi fakta, pikiran, perasaan kebutuhan dan sasaran kepada orang tua murid dan masyarakat harus dilakukan oleh lembaga pendidikan. Munculnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 berarti bahwa masyarakat, orang tua murid (komite) mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan kepada sekolah.

Sebagaimana di tegaskan oleh Mulyasa bahwa, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi sekolah sesuai dengan paradigma baru manajemen pendidikan, diharuskan perlunya memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah secara optimal. Hal ini penting karena sekolah memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan sekaligus memerlukan dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan program tersebut sehingga muncul hubungan timbal balik yang saling menguntungkan (*mutualisma*).⁶

Untuk menjalin hubungan yang baik sekolah dengan masyarakat tentunya kepala sekolah harus berperan aktif walaupun sudah ada petugas khusus yang berperan sebagai humas yang di tunjuk dari pihak sekolah. Model manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan sekolah yang direncanakan dan di usahakan secara sengaja dan

⁶ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.163

bersungguh sungguh, dan pembinaan secara continue untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat yang berkepentingan langsung dengan sekolah. Oleh karena sekolah berkewajiban memberikan penjelasan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan sekolah. Sebaliknya sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan dan harapan serta tuntutan masyarakat, terutama terhadap sekolah.⁷ Partisipasi masyarakat dan lingkungan sekitar ini semakin dirasakan penting pada masyarakat yang telah menyadari dan memahami pentingnya pendidikan. Keterbatasan pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana, serta pembiayaan pendidikan, menyebabkan dukungan serta partisipasi masyarakat menjadi semakin penting, terutama masyarakat yang terkait langsung dengan madrasah yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan pendidikan

Berdasarkan pemaparan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti di MI Ma'arif NU 1 Pliken yang terletak di kecamatan Kembaran. Pemilihan lokasi peneliti dengan alasan, Masyarakat dan Komite sekolah yang merupakan wakil masyarakat di MI Ma'arif NU 1 Pliken adalah salah satu Komite sekolah yang selama ini aktif bersama masyarakat berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Ma'arif NU 1 Pliken.

MI Ma'arif NU 1 Pliken adalah Madrasah swasta yang bergabung dengan yayasan Lembaga pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Banyumas, yang bernaung dibawah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. MI Ma'arif NU 1 Pliken merupakan salah satu madrasah yang partisipasi masyarakatnya terwadahi dalam organisasi Komite sekolah, yang merupakan perwakilan dari masyarakat, orangtua siswa dan tokoh masyarakat Pliken dan sekitarnya. Berdasarkan study pendahuluan penulis diperoleh dari hasil observasi awal dengan Kepala MI Ma'arif NU 1 Pliken, Muhimah, S.Pd.I. dan Komite sekolah Bapak Chamdan BA, pada tanggal 18 Pebruari 2017.⁸ Bahwa di MI

⁷ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2007). hlm.50

⁸ Hasil Wawancara dengan Muhimah, S.Pd.I, Chamdan, BA, (Kepala MI dan Komite Sekolah MI Ma'arif NU 1 Pliken), Tanggal 18 Pebruari 2017.

Ma'arif NU 1 Pliken telah terlaksana partisipasi masyarakat terhadap Madrasah, dimana mereka terutama Komite sekolah, tokoh masyarakat, wali murid atau orang tua siswa saling bekerjasama dengan baik, untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program yang direncanakan oleh MI Ma'arif NU 1 Pliken. Baik dalam bidang akademik maupun bidang non akademik. Hal ini terbukti dari tahun ketahun prestasi MI Ma'arif NU 1 Pliken semakin meningkat baik bidang akademik maupun non akademik. Selain itu siswanya juga mengalami kenaikan yang signifikan karena dua tahun yang lalu tahun 2014 jumlah siswanya 115 siswa. kemudian tahun 2015 naik menjadi 160 siswa dan tahun ajaran 2016/2017 siswanya mengalami kenaikan lagi sehingga jumlah siswanya sekarang 189 siswa, semua itu terjadi karena adanya kerjasama dengan komite sekolah dan partisipasi dari masyarakat.

Komite Sekolah di MI Ma'arif NU 1 Pliken dari segi dukungan, partisipasi bidang non akademik sangat baik seperti bidang olah raga catur terbukti dalam perlombaan tahun 2017 menjadi juara 1 tingkat kawedanan sokaraja dan masuk juara ke 2 di tingkat Kabupaten Banyumas. Disamping itu pada perlombaan baca puisi juga meraih juara ke 2 pada tingkat kabupaten. Dalam bidang akademik partisipasi masyarakat juga ikut ambil bagian seperti dalam pelaksanaan tambahan jam mengajar untuk anak-anak yang kurang bisa membaca dan menulis Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh wali murid dan guru-guru MI Ma'arif NU 1 Pliken dengan cara di jadwal secara bergantian yang dilaksanakan dengan suka rela. Sedangkan bidang sarana dan prasarana komite sekolah beserta masyarakat aktif membantu, menurut seksi pembangunan bapak Ibnu Mustolih bahwa Komite sekolah bekerja sama dengan masyarakat telah memberikan bantuan pembangunan Mushola untuk MI Pliken dan sekarang musholanya sudah bisa dipakai sebagai kegiatan sholat Zhuhur berjamaah dan sholat Duha.

Dukungan yang lain bentuk partisipasi masyarakat terhadap MI Ma'arif NU Pliken adalah kegiatan Ekstrakurikuler seperti Drum band, Hadroh, MTQ, selalu didukung baik dari segi sarana maupun dalam pelatihannya. Seperti

bidang Seni Membaca Al-Qur'an MI Ma'arif NU Pliken selalu meraih Juara 1 tingkat kecamatan Kembaran bahkan tingkat Kabupaten, menurut informasi dari komite sekolah Bapak Ibnu Mustolih bahwa siswa yang punya bakat bidang seni membaca Al-Qur'an (MTQ) dilatih langsung oleh relawan dari wali murid, setelah pulang sekolah dengan di jadwal seminggu 2-3 pertemuan sehingga di setiap waktu ada even perlombaan bidang seni membaca Al-Qur'an anak-anak yang di latih sudah siap dan tidak terkesan mendadak.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam serta meneliti lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat di MI Ma'arif NU 1 Pliken oleh karena peneliti menulis judul penelitian: "Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Ma'arif NU Pliken Kecamatan Kembaran.

B. Fokus Penelitian

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁹ Sehingga dapat hidup mandiri dan hidup layak di tengah tengah masyarakat, dan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dan selalu direncanakan apabila melaksanakan suatu tindakan. Upaya untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan telah banyak dilakukan, tetapi pendidikan masih dihadapkan kepada berbagai masalah antara lain yang paling krusial adalah rendahnya mutu pendidikan.

Dari beberapa kajian, ternyata salah satu faktor penyebabnya antara lain adalah minimnya partisipasi komite sekolah/masyarakat dalam menentukan kebijakan pendidikan, sebagai akibatnya masyarakat kurang merasa memiliki, kurang tanggung jawab dalam memelihara dan membina sekolah dimana anak-anaknya bersekolah. Pendekatan ini sangat memerlukan partisipasi yang tinggi dari masyarakat, baik yang terwadahkan dalam komite sekolah, dewan

⁹ Teguh Triwiyanto, *Pengantar pendidikan*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2014),hlm.113.

pendidikan maupun masyarakat secara umum. Partisipasi yang tinggi dari orang tua murid dalam pendidikan di sekolah merupakan salah satu ciri dari pengelolaan sekolah yang baik, artinya sejauh mana masyarakat dapat berperan dalam proses pendidikan di sekolah.

Terkait dengan identifikasi pokok-pokok pikiran di atas, dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, keluasan tema, dan memperhatikan relevansi dengan bidang tugas peneliti, maka kajian dalam penelitian ini dibatasi pada masalah partisipasi komite sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Ma'arif NU 1 Pliken Kecamatan Kembaran dengan bentuk Partisipasi masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Bentuk-bentuk Partisipasi Komite sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Ma'arif NU 1 Pliken Kecamatan Kembaran?”

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian bertujuan untuk Mengetahui Bentuk-bentuk Partisipasi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Ma'arif NU 1 Pliken Kecamatan Kembaran.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yang sifat pendekatannya naturalistik kualitatif dapat dilihat dari dua segi manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai salah satu khazanah keilmuan bagi penulis dan pembaca khususnya yang menyangkut tentang proses pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Ma'arif NU 1 Pliken.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi praktisi pendidikan dan peneliti lain yang berminat melakukan

penelitian tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat hasil penelitian ini secara praktis dapat di lihat sebagai berikut:

- a. Sebagai masukan dan sumbangan terhadap kepala sekolah, MI dan petugas humas dalam menyempurnakan kegiatannya sebagai pemimpin administrasi secara kreatif. Disamping itu juga sebagai masukan bagi kepala madrasah, waka humas dan atasan lainnya dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembinaan terhadap guru.
- b. Deskripsi ini serta analisis yang diperoleh dapat digunakan oleh sekolah sebagai informasi aktual dalam menyusun kebijakan sekolah atas pengembangan proses administratif tentang partisipasi masyarakat di sekolah.
- c. Menambah Ilmu dan pengalaman peneliti dalam hal partisipasi masyarakat yang berjalan di lingkungan sekolah.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan sistematika penulisan tesis yang akan digunakan dalam penelitian dengan judul “Partisipasi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Ma’arif NU Pliken Kecamatan Kembaran”, secara keseluruhan terdiri dari lima bab, di mana masing-masing bab disusun secara rinci dan sistematis dengan dikandung maksud agar dapat memberikan gambaran tentang logika peneliti dalam menjawab permasalahan. Adapun rancangan sistematika penulisan pembahasan sebagai berikut:

Bab Kesatu Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan tentang pentingnya permasalahan yang terjadi dan menjadi perhatian peneliti. Pada bagian ini dijelaskan tentang peran serta masyarakat dan partisipasinya komite sekolah yang terjadi di MI Ma’arif NU Pliken Kecamatan Kembaran. Dalam bab ini juga memaparkan fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan bagian yang terakhir bab kesatu adalah sistematika penulisan ini sendiri.

Bab Kedua Partisipasi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, bab ini secara umum berisi tentang perdebatan akademik sesuai dengan tema tesis, merupakan uraian kajian dari berbagai literatur dan berbagai teori dan argumen dari para ahli yang relevan dengan judul penelitian ini. Bagian pertama dari bab ini dibahas tentang konsep Partisipasi Masyarakat yang meliputi pembahasan tentang: Pengertian Partisipasi masyarakat Fungsi Tujuan Partisipasi masyarakat, Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan bagian kedua tentang peningkatan mutu pendidikan yang di capai akibat dari partisipasi masyarakat di lingkungan sekolah atau madrasah.

Bab Ketiga Metode Penelitian, bab ini secara umum membahas tentang cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian dengan tujuan dan kegunaan yang sesuai dengan judul penelitian ini, sehingga dalam bab ini diuraikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, Pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data yang meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Diuraikan pula tentang analisis data dengan cara: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Sedangkan dalam rangka validasi data dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan melakukan triangulasi.

Bab Keempat Hasil Penelitian, bab ini menguraikan tentang paparan jawaban sistematis fokus penelitian dan hasil temuan peneliti yang mencakup setidaknya 3 hal, yakni (1) gambaran umum Profil MI Marif NU Pliken (2) Paparan data yang meliputi: Partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Ma'arif NU Pliken, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di MI Ma'arif NU Pliken, dan (3) Temuan penelitian yang meliputi: Partisipasi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Ma'arif NU Pliken.

Bab Kelima, bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari temuan penelitian dan hasil pembahasan dan kata penutup.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian, paparan data, temuan penelitian serta analisa data dan pembahasan tesis yang berjudul “ Partisipasi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Ma’arif NU Pliken Kecamatan Kembaran”, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Partisipasi komite sekolah di MI Ma’arif NU Pliken menunjukkan bahwa, komite sekolah dan orangtua siswa mempunyai kemauan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Hal ini terdeteksi dengan keterlibatannya komite sekolah dalam penyusunan perencanaan program dan keputusan kebijakan, adanya keterlibatan komite sekolah dan orang tua dalam pelaksanaan peningkatan pendidikan.

Disamping itu komite sekolah dan orangtua siswa serta masyarakat ikut menyusun dan mengesahkan RAPBM, serta ikut memberi masukan dan ide gagasan dalam rangka meningkatkan partisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Ma’arif NU Pliken. Di lain hal Komite sekolah dengan bekerjasama dengan masyarakat telah membantu baik matrial maupun tenaga serta sarana-sarana yang lain baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Selain itu usaha MI Ma’arif NU Pliken untuk memberdayakan masyarakat Pliken adalah dengan meminta masukan, kritikan dan saran dari orangtua siswa dan masyarakat sekitar serta komite sekolah dalam menyusun dan mengesahkan RAPBM. Dan menjalin komunikasi dengan komite sekolah dan orangtua siswa mengenai program sekolah, kemajuan siswa, dan menjalin kerjasama dengan orangtua siswa untuk membantu anak dalam kegiatan pembelajaran.

2. Adapun partisipasi masyarakat MI Ma’arif NU Pliken cukup baik dimana menurut pola tingkatan partisipasi masyarakat bentuk (*Form*) partisipasi di MI Ma’arif NU Pliken dalam tingkat Bentuk Partisipasi masuk level

Transformative participation, artinya level tertinggi yaitu level ke-4, yaitu partisipasi transformasi, dalam pengertian bahwa masyarakat tidak hanya sekedar telah ikut memberikan partisipasi nominal, yang berupa dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan madrasah, namun mampu ikut merumuskan program dan kegiatan untuk mengubah persepsi sekolah, dan melaksanakan program dan kegiatan tersebut dengan penuh tanggung jawab.

3. Partisipasi dalam tingkat partisipasi menurut sekolah (*top-down*) masuk pada *level Sustainability*, artinya sekolah mendorong masyarakat untuk merencanakan program dan merespon suara masyarakat. namun dalam pelaksanaannya belum bisa di wujudkan atau diimplementasikan secara keseluruhan sehingga MI Ma'arif NU Pliken belum mampu memberdayakan masyarakat secara maksimal sesuai dengan program yang diinginkan walaupun pihak madrasah sudah bisa memberdayakan masyarakat seperti perbaikan/rehab ringan dan pembangunan mushola, serta kegiatan-kegiatan lain yang tidak memakai biaya yang besar. Namun belum mampu melaksanakan program untuk pelaksanaan pembangunan pembuatan ruang kelas barau (RKB) sesuai dengan rencana program yang direncanakan.
4. Sedangkan pada partisipasi menurut masyarakat (*Bottom-up*) masuk level *empowered participation* artinya masuk level tertinggi dimana masyarakat memberdayakan ikut memutuskan program dan masyarakat merasa memiliki program sekolah tersebut. Hasil analisis studi lapangan bahwa keterlibatan komite sekolah di MI Ma'arif NU Pliken aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Diantaranya dengan melakukan kunjungan ke Madrasah atau dewan guru. Di samping itu Komite Sekolah tidak hanya hadir dalam pertemuan di sekolah tetapi ikut terlibat dalam penyusunan program yaitu ikut memverifikasi RAPBM sebelum disahkan dan ikut menandatangani RAPBM dalam dokumen pengesahan RAPBM.

5. Partisipasi menurut fungsi (*Function*) masuk pada tertinggi yaitu level *mean/end*, artinya masyarakat ikut berpartisipasi mengelola program yang telah di putuskan. Dimana partisipasi masyarakat di MI Ma'arif NU Pliken tidak hanya sebatas pajangan (*display*) yaitu hanya hadir dalam pertemuan tanpa ada input dari masyarakat. Namun madrasah mendorong partisipasi masyarakat dengan melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk memperoleh masukan dan ide atau gagasan dari masyarakat untuk peningkatan pelayanan masyarakat, agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi, dan masyarakat berperan sebagai pengelola program sesuai kegiatan yang telah direncanakan secara bersama sama dengan orang tua siswa dan masyarakat. Karena masyarakat lebih aktif berpartisipasi dan sebagai pengelola program maka diharapkan pelaksanaan sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan bersama orang tua dan masyarakat.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi komite sekolah di MI Ma'arif pliken sudah terlaksana yaitu berupa dana, barang, tenaga dan pemikiran, karena kondisi dan keterbatasan masyarakat dilingkungan madrasah maka partisipasi komite sekolah masih terbatas dan belum maksimal, sebagaimana yang ada dalam paparan teori penelitian ini. Walaupun demikian partisipasi komite sekolah perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Adapun partisipasi komite sekolah yang di MI Ma'arif NU Pliken yaitu berupa:

- a. Dana seperti sumbangan untuk pembangunan mushola, pemberian santunan bagi siswa yatim dan kurang mampu serta anak yang berprestasi.
- b. Barang contohnya yaitu: Semen, Batu bata merah, cat tembok, Baju seragam untuk siswa tidak mampu dan anak yatim piatu.
- c. Tenaga yaitu membantu memberikan pembelajaran BTA, Seni baca Al-Qur'an (MTQ), melatih kegiatan ekstrakurikuler pramuka, Olah raga tenis mela, catur, dan pidacil.
- d. Pemikiran yaitu komite sekolah sering memberi masukan, ide gagasan, dan saran disaat rapat bersama dalam pembuatan RAPBM.

Adapun partisipasi komite sekolah yang belum bisa dilaksanakan sesuai dengan teori dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pemberian dana untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).
- b. Penyediaan Sumberdaya pendidikan/tenaga ahli secara memadai.
- c. Pemberian pengadaan bantuan buku-buku pelajaran yang cukup
- d. Pemberian beasiswa bagi siswa yang kuarng mampu/berprestasi.
- e. Pengadaan sarana dan prasarana Computer/leptop.

Demikian patisipasi komite sekolah di MI Ma'arif NU 1 Pliken yang bisa kami simpulkan, sebenarnya masih banyak yang harus dilakukan dengan mengutip dan mengambil manfaat dari beberapa teori yang ada dalam penelitian ini, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Dengan harapan semoga dengan adanya kerjasama dan motivasi serta dukungan partisipasi komite sekolah dan masyarakat maka mutu prestasi pendidikan di MI Ma'arif NU Pliken semakin meningkat.

B. Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian dapat di sampaikan beberapa rekomendasi hasil penelitian. Adapun saran-saran ini dapat dilakukan oleh sekolah ataupun lembaga lain dalam rangka meningkatkan pendidikan.

1. Membentuk forum komunikasi antara komite sekolah, sebagai alat komunikasi antara komite yang satu dengan komite sekolah yang lain untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
2. Mendorong dan menciptakan kondisi agar komite sekolah dipimpin oleh figur tokoh masyarakat yang yang memiliki karakter sebagai pemimpin dan intelektual serta paham tentang pendidikan dan permasalahan-permasalahan di masyarakat.
3. Perlu di pemberdayakan adanya kemampuan orangtua siswa dan masyarakat dan pemerhati pendidikan untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Dan menyadarkan bahwa paradigma pendidikan sudah berubah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi yang berbasis partisipasi masyarakat dan manajemen berbasis sekolah yang harus melibatkan peran serta masyarakat.

4. Membudayakan komunikasi antara sekolah dengan seluruh komponen masyarakat. Dengan komunikasi yang baik maka akan mudah dalam segala permasalahan yang dihadapi sekolah.
5. Sebaiknya ada pembinaan oleh pihak pemerintah atau instansi terkait dengan lembaga komite sekolah.

C. Kata Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamin dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, yang melimpahkan ridlo, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Dengan segenap kesadaran hati penulis meyakini sepenuhnya akan banyaknya kelemahan, kekurangan dalam penulisan tesis ini. Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki sehingga penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Selaku insan yang lemah dan hamba yang pelupa, penulis memohon kritik dan saran yang membangun dari segenap pembaca yang bijaksana dan arif.

Akhirnya dengan segenap kerendahan hati, penulis memohon kepada Allah SWT, kiranya tesis ini bisa menjadi buah karya yang berguna bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan rido-Nya yang mengantarkan kita ke dermaga kehidupan bahagia, selamat di dunia dan akhirat. Dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu penyelesaian tesis ini, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah Swt memberi balasan yang sesuai dengan amal baiknya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti Dwiningrum, Siti Irene. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.*
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, akarta: Rineka Cipta, 2002.
- Alwi, Hasan. *Tim Penyusun Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Tips Alikasi Manajemen Sekolah*, Jogjakarta: Diva Press, 2012.
- Choliq, Abdul. *Diskurus Manajemen Pendidikan Islam*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012
- Departemen Pendidikan Nasional, *Partisipasi Masyarakat*, 2001
- Eko Agustinova, Danu. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Fathurrohman ,Muhammad ,Sulistyorini. *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*. Yogyakarta : Teras, 2012.
- <https://www.word.press/2013/08/faktor-yang-mempengaruhi-partisipasi.html>. diakses tanggal 22 Mei 2017.
- <http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat.html>. diakses tanggal 23 mei 2017.
- <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp>. *Depoliticising Development: The Uses and Abuses of Participation* ;Sarah White, 1996) Artikel. (di akses tanggal 10 Pebruari 2017.)
- Ihsan, Fuad. *Dasar-dasar Kependidikan, Komponen MKDK*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Irene Siti, Astuti Dwiningrum. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.*
- Jahari, Jaja dan Amirulloh Syarbini. *Manajmen Madrasah, Teori, Strategi, dan Implementasi*, Bandung: Alfabeta, 2013.

- Jatnika, Ande. *Pemberdayaan Dewan Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. (Studi Analisis terhadap Implementasi konsep manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Se kabupaten Majalengka.* Tesis, UPI Jakarta, 2013.
- Junedi, Abdilah. *Manajemen Mutu Peserta Didik di SMK Muhammadiyah 1 Paguyangan Brebes.* Tesis, IAIN Purwokerto. 2015.
- Jihad, Nur. *Partisipasi masyarakat dalam pendidikan islam di SMP. 1 Taliwang dan Mts 1 Taliwang.* Tesis, UIN Maliki Malang, 2010.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah.* Yogyakarta: Adica Karya Nusa, 2011
- Kepmendiknas, Nomor: 044/U/2002, *tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.* Kemendiknas, 2002, hlm. 12
- Komariah dan Triatna. *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif,* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Karsidi. *Sosiologi Pendidikan.* Surakarta : LPP UNS Press, 2008.
- Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mulyasa. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nurkolis. *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model, dan Aplikasi,* Jakarta: PT. Grasindo, 2006.
- Pidarta, Made. *Manajemen Pendidikan Indonesia,* Jakarta : PT Rineka Cipta, 2011.
- Permendiknas Republik Indonesia, No. 13 Tahun 2007, *Tentang Standar Kepala Sekolah,* Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ramli, Mohamad. *Manajemen Partisipasi Masyarakat, studi kasus MIN Malang* (Tesis, UIN Malang, 2008)
- Rohmad. *Tim Penyusun Panduan Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Purwokerto,* 2015.

- Rohmat. *Kepemimpinan pendidikan*, STAIN Pres Purwokerto, 2010.
- Rifa'i, Mohammad. *Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan Mutu pendidikan ,studi kasus di M.A. TMI Al Amien Prenduan Sumenep*. Tesis,UIN Malang, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sujanto, Bedjo. *Manajemen Berbasis Sekolah,Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: CV.Sagung Seto, 2009.
- Sagala, Saeful. *Kemampuan profesional guru dan tenaga kependidikan ,Pemberdayaan tenaga kependidikan dan masyarakat dalam manajmen sekolah*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suryosubroto. *Humas Dalam Dunia Pendidikan*, Yogyakarta: Mitra Gama Widya. 2001.
- Suryosubroto. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Jakarta: PT.Rineka Cipta. 2012.
- Sumber Dokumen Prestasi Kejuaraan ,Administrasi Tata Usaha MI Ma;arif NU Pliken*
- Soetomo. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Triwiyanto, Teguh. *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009
- Undang-undang No.20 tahun 2003. *tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Citra Umbara, 2006.